



#### RUU CIPTA KERJA

### Sultan HB X Berjanji Teruskan Aspirasi Buruh ke Presiden

YOGYAKARTA, KOMPAS — Unjuk rasa buruh dan mahasiswa memprotes Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pecah di sejumlah daerah, Kamis (8/10/2020). Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menerima perwakilan pengunjuk rasa di Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, dan berjanji meneruskan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.

Perwakilan serikat buruh diterima di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, pukul 12.30, setelah menjalani tes cepat terlebih dulu. Sultan HB X menerima perwakilan dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, yang merupakan aliansi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, Serikat Pekerja Nasional DIY, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Regional DIY Jawa Tengah, dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia DIY.

Perwakilan MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan, mereka meminta Gubernur DIY mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut RUU Cipta Kerja. Selain itu, perwakilan buruh juga mendesak Gubernur DIY agar meningkatkan pendapatan buruh di luar upah dengan membantu koperasi buruh.

Sultan HB X pun menyatakan, dirinya akan menulis surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meneruskan aspirasi para buruh tersebut. "Mereka menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi mengirim surat kepada Presiden mengenai aspirasi masyarakat, khususnya para buruh. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka," kata Sultan.

Di Surabaya, Jawa Timur, unjuk rasa diwarnai perusakan gedung pemerintah. Sedikitnya 150 orang ditangkap polisi karena bersenjata dan dicurigai hendak membuat kerusuhan.

Di Grahadi, Surabaya, pengunjuk rasa membakar separator lalu lintas berbahan plastik, merusak fasilitas Taman Grahadi,



Sepeda motor yang hangus tergeletak di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (8/10/2020). Di latar belakang tampak restoran yang juga hangus terbakar di tengah kerusuhan aksi unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta.

memblokade jalan, dan merusak sebagian Taman Hapsari. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Jhonny Edison Isir menyatakan, pihaknya menangkap sedikitnya 150 orang, kebanyakan remaja, yang kedapatan membawa senjata dan botol berisi bahan bakar minyak. Anak-anak itu diyakini tak berafiliasi dengan serikat buruh atau kampus dan bukan merupakan warga Surabaya. "Kami tangkap karena mereka dicurigai akan menyusul kerusuhan," kata Isir.

Salah satu elemen yang turun dalam demonstrasi ialah massa yang menanamkan diri Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim. Selain itu, juga serikat buruh dan kalangan mahasiswa dari kampus-kampus di Surabaya. Juru Bicara Getol Jatim Habibus Shalihin mengatakan, massa merupakan gabungan dari 50 organisasi buruh, petani, mahasiswa, dan kelompok miskin kota. "Kami menuntut agar pemerintah dan DPR mencabut RUU Cipta Kerja," ujar Habibus, yang juga Ketua Bi-

daung Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.

Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatin Nurudin, dalam kesempatan terpisah, mengatakan, kerugian dari RUU Cipta Kerja terhadap buruh ialah terkait penetapan upah. Regulasi ini berpotensi menghilangkan skema penetapan upah minimum kabupaten/kota yang di Jatim berbeda dengan upah minimum provinsi.

Adapun di Medan, Sumatera Utara, unjuk rasa menentang RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Medan berlangsung rusuh. Mahasiswa, siswa, dan buruh yang berunjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan dan merusak sejumlah gedung. Kerusuhan pecah ketika ribuan pengunjuk rasa memadati Jalan Imam Bonjol di Depan Gedung DPRD Sumut dan DPRD Medan. Pengunjuk rasa juga memenuhi Jalan Kapten Maulana Lubis hingga Jalan Raden Saleh.

Unjuk rasa awalnya dilaku-

kan dengan orasi aktivis serikat buruh dan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumut, Universitas HKBP Nommensen. "Kami menolak RUU Cipta Kerja karena menysangkakan buruh, petani, mahasiswa, dan rakyat kecil. Kami meminta RUU ini dicabut," kata Martin Luis dari Departemen Advokasi Federasi Perjuangan Buruh Indonesia dalam orasinya.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, ribuan mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di Gedung DPRD Sultra, Kamis siang, dalam penjagaan aparat keamanan. Massa dari berbagai elemen, antara lain Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, HMI, dan PMII, berkumpul di sekitar Gedung DPRD Sultra. Mereka membakar ban, berorasi, dan menyanyikan lagu perjuangan.

Harli Basukri, mahasiswa IAIN Kendari, mengungkapkan, aksi damai memprotes inkonsistensi pemerintah dan DPR karena dalam pandemi Covid-19 membahas dan me-

nyetujui RUU Cipta Kerja yang tak berpihak pada masyarakat. "RUU Cipta Kerja menerabas hak buruh, lingkungan hidup, hingga pendidikan," ujarnya.

Di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalteng. Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, Kalteng, sekitar pukul 0900 WIB, disambut Pelaksana Tugas Gubernur Kalteng Habib Said Ismail. Presiden pun langsung terbang menggunakan helikopter ke lokasi lumbung pangan nasional di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau.

#### Kewenangan pemda

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada pemerintah pusat melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Apeksi menyampaikan agar pemerintah mencermati lagi *omnibus law*, termasuk di dalamnya RUU Cipta Kerja. Beberapa pasal dinilai mengurangi kewenangan pemerintah daerah.

"Kami hormati karena ini sudah disetujui DPR RI. Namun, kami sudah memberi masukan melalui Apeksi sebelum disetujui. Misalnya, terkait beberapa perizinan yang ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesannya, (perizinan) seperti tersentral di pemerintah pusat," ujar Rizal.

Hal senada dikemukakan Wali Kota Malang Sutiaji. "Jika ke depan perizinan usaha semua ditangani pusat, akan muncul masalah di Kota Malang. Fokus penguatan UMKM bisa bertentangan dengan mudahnya pusat memberi izin usaha pasar modern di Kota Malang, misalnya. Ini akan memicu konflik," kata wali kota yang diusung Partai Demokrat tersebut.

(NSA/CIP/DIA/ESA/ZAK/  
NDU/JAL/ITA/MEL/DIT/XII/  
AIN/RTG/IDO/OKA/JOL/HRS/  
VIO/ETA/BRO/JUM/NIK/EGI/  
NCA/VDL/IKD)

| Instansi                                            | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 28 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005